

## **BAB IX**

### **KELEMBAGAAN**

#### **9.1. Langkah-Langkah Pelaksanaan**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan industri yang telah dirumuskan, perlu mendapatkan komitmen dan dukungan dari Instansi/Departemen lain, utamanya yang berkaitan terhadap :

- a. Pengembangan Lingkungan Bisnis
- b. Pengembangan Infrastruktur
- c. Pengembangan Investasi
- d. Pengembangan Pasar
- e. Pengembangan Kemampuan Tenaga Kerja Industrial
- f. Pengembangan Teknologi Industri; dan
- g. Pengembangan Bahan Baku / Penolong

Secara rinci, aspek-aspek yang perlu mendapatkan dukungan dari Instansi/Departemen lainnya, diusulkan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Lingkungan Bisnis
  - Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor, pelabuhan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan retribusi), perpajakan;
  - Menjamin HaKI;
  - Meningkatkan ketersediaan pelayanan jasa termasuk jasa profesional (keuangan, akuntansi, konsultasi, perikanan, pemasaran, notariat, pengujian, sertifikasi, konultan hukum, dll) dan jasa publik (perizinan, dll);
  - Mengimplementasikan dan menyempurnakan perangkat hukum yang terkait dengan pengembangan usaha;
  - Peningkatan insentif dan fasilitasi di sektor industri;

Dalam pengembangan lingkungan bisnis ini, Instansi / Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, BKPM, Departemen Kehakiman dan HAM, Polri, Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum.

b. Pengembangan Infrastruktur

Memperluas infratraktur fisik melalui penyediaan fasilitas terutama untuk transportasi, bongkar muat, telekomunikasi dan transmisi, energi, air bersih, dan penataan ruang industri prioritas (kawasan industri, dan wilayah Pusat Pertumbuhan industri serta zona industri, dengan mempertimbangkan pelaksanaan fungsi desentralisasi.

Dalam pengembangan infrastruktur ini, Instansi / Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan, Departemen ESDM, dan Pemda

c. Pengembangan Investasi

- Peningkatan iklim investasi yang sehat di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi biaya produksi di sektor industri
- Memberikan kemudahan akses permodalan terutama untuk melakukan restrukturisasi industri dan pengembangan industri pendukung dan terkait
- Merangsang adanya aliran investasi baik dalam dan luar negeri serta alternatif sumber pembiayaan pengembangan industri
- Merumuskan kebijakan investasi yang dapat menarik investasi asing ke dalam negeri
- Memfasilitasi pembiayaan untuk investasi IKM (UKMK).

Dalam pengembangan investasi ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain : Departemen Keuangan, Bank Indonesia, BKPM dan Perbankan, Kementerian Koperasi dan UKM.

d. Pengembangan Pasar

- Peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- Peningkatan promosi dan jaringan pemasaran global
- Peningkatan aliansi dengan TNC
- Membangun Merk dagang Indonesia di pasar global
- Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

Dalam pengembangan pasar ini, Instansi / Departemen yang perlu mendukung antara lain : Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Kominfo, Kementerian Koperasi dan UKM.

e. Pengembangan Tenaga Kerja Industri

- Melakukan reorientasi pengembangan SDM dengan mengacu pada kebutuhan dunia industri
- Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sampai dengan perguruan tinggi khususnya di bidang teknik yang menghasilkan tenaga ahli madya
- Memperluas infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keahlian tenaga kerja di bidang teknik dan manajerial
- Meningkatkan keterkaitan lembaga litbang, industri serta perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi yang tepat dalam pelatihan tenaga kerja untuk industri
- Meningkatkan kompetensi SDM industri melalui program pendidikan, pelatihan dan pemagangan dengan mendayagunakan lembaga sertifikasi tenaga profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus di bidang teknologi, proses dan produk, teknik desain dan manajemen

Dalam pengembangan SDM ini, Instansi / Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Diknas, Departemen Nakertrans, KRT, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Koperasi dan UKM.

f. Pengembangan Teknologi Industri

- Peningkatan Kapasitas (pendalaman) Teknologi pada sistem produksi
- Peningkatan jumlah penemuan baru hasil litbang nasional yang dapat dimanfaatkan oleh sistem produksi
- Peningkatan kapasitas difusi teknologi pada sistem produksi
- Peningkatan kapasitas kelembagaan Teknologi dalam mendukung sistem produksi
- Peningkatan intermediasi dan pola insentif yang mendorong kemitraan dan kegiatan litbang di dunia usaha
- Mendorong pengembangan rancang bangun dan perekayasaan industri dan pembentukan lembaga R&D dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan bahan baku alternatif
- Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan dan menyerap teknologi dan inovasi yang berorientasi pasar

Dalam pengembangan Teknologi Industri ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Diknas, Lembaga Litbang, KRT, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Koperasi dan UKM.

g. Pengembangan Bahan Baku/Penolong

- Peningkatan ketersediaan dukungan bahan baku/penolong dari dalam negeri dengan harga kompetitif
- Peningkatan kualitas, produktivita, dan kelangsungan bahan baku/penolong
- Peningkatan kapasitas difusi teknologi pada sistem produksi bahan baku/penolong
- Peningkatan penerapan teknologi pada sistem produksi bahan baku/penolong

Dalam pengembangan Bahan Baku/Penolong ini, Instansi/Departemen yang perlu mendukung antara lain: Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen ESDM, dan Departemen Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM.

## 9.2. Kerangka Pelaksanaan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional pengembangan industri, serta menselaraskan dan mensinergikan langkah-langkah pelaksanaan diperlukan kerja sama yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya suatu mekanisme operasional dalam rangka melakukan koordinasi dan memonitor pelaksanaan kebijakan pengembangan industri nasional.

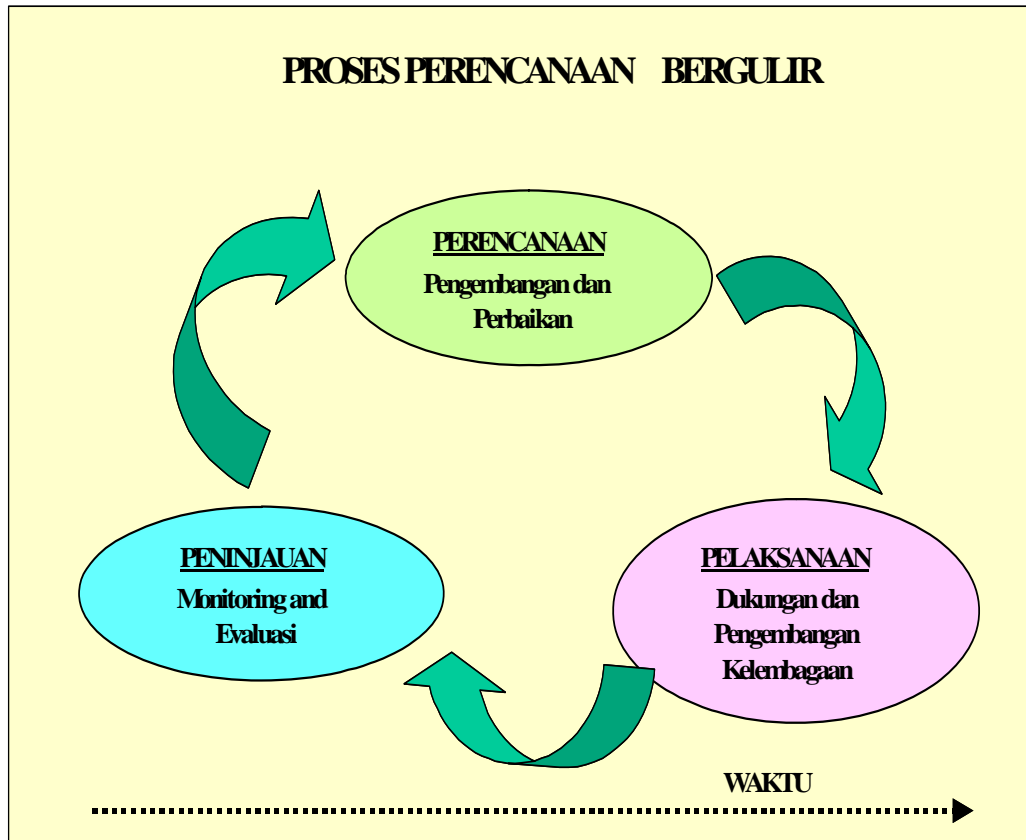
Keberhasilan pendekatan klaster sangat tergantung dari efektifitas hubungan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha (*Public-Private Partnership*), sehingga adanya mekanisme tersebut akan mendorong terjadinya komunikasi diantara para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dalam rangka merumuskan rencana lebih terinci serta mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan pengembangan industri berbasis klaster, akan dibentuk Kelompok-Kelompok Kerja Teknis (*Working Group*). Adapun Kelompok Kerja ini beranggotakan semua Pemangku Kepentingan utama yang terlibat baik dari pemerintah, dunia usaha maupun lembaga pendukung seperti lembaga litbang dan pelatihan. Kelompok Kerja ini akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan klaster industri dimaksud secara berskala setidaknya setiap enam bulan sekali. Selanjutnya Kelompok Kerja harus melaporkan hasil-hasil pekerjaannya kepada Departemen Perindustrian.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka untuk tingkat propinsi dan kabupaten mekanisme serupa di setiap daerah perlu dibentuk, yang akan bertugas memonitor perkembangan klaster industri yang ada di daerah.

### 9.3. Proses Perencanaan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan industri nasional ini sangat erat kaitannya dengan beberapa proses penting yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, yang tergambar dalam bentuk Proses Perencanaan Bergulir (*Rolling Plan Process*) seperti diperlihatkan pada Gambar 9.1.



Gambar 9.1. Proses Perencanaan Bergulir

Tata waktu pelaksanaan Proses Perencanaan Bergulir (*Rolling Plan Process*) dilakukan sebagai berikut :

- **Berkala** (tahunan, 5 tahunan) mengacu kepada kebijakan umum Nasional yang berlaku;
- **Crash Program/Insidentil**, untuk mengambil langkah cepat guna mengantisipasi maupun mengatasi perkembangan nyata (*significant*) yang terjadi pada lingkungan bisnis nasional maupun lingkungan global.